

Mewujudkan Pengelolaan Sub-Bentang Lahan yang Berkelanjutan dan Mendorong Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Efektif yang Memberikan Manfaat terhadap Masyarakat

Rencana Pengelolaan Sublanskap Mangsang-Sukadamai

Amiril, Andri Abbas, Lia karlina sinamo, Jolinatalius Aritonang,
Januardi Masrullah, Machmudi, Ingriyani



Mewujudkan Pengelolaan Sub-Bentang Lahan yang Berkelanjutan dan Mendorong Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Efektif yang Memberikan Manfaat terhadap Masyarakat

Rencana Pengelolaan Sublanskap Mangsang-Sukadamai

Tim Penulis

(Kelompok Kerja Bentang Lahan)

Amiril, Andri Abbas, Lia karlina sinamo, Jolinatalius Aritonang, Januardi Masrullah, Machmudi, Ingriyani

Tim Teknis

(ICRAF Indonesia)

Arif Budi Nugraha, Seruni Fauzia Lestari, Ira Ratna Sari, Cecilia Novia, Dewi Kiswani Bodro, Nurhayatun Nafsiyah, Thifali Adzani, Rendra Bayu Prasetyo, Anugerah Yuliadi, Yoga Lorensa Putra, Era Irhamni, Agrian Maulana, Yesi Lismawati, Syamsul Asinar, Asep Suryadi, Feri Johana, Ni'matul Khasanah, Suyanto, Andree Ekadinata, Sonya Dewi

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

Amiril, Abbas A, Sinamo LK, Aritonang J, Masrullah J, Machmudi, Ingriyani. 2026. Mewujudkan Pengelolaan Sub-Bentang Lahan yang Berkelanjutan dan Mendorong Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Efektif yang Memberikan Manfaat terhadap Masyarakat. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

© 2026 World Agroforestry (ICRAF)

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

CIFOR–ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Muhammad Azizy

2026

Daftar Isi

- 2 Gambaran Umum
- 3 Isu Strategis Sublanskap
Muara Medak-Mendis Jaya
- 4 Strategi Pengelolaan dan
Capaian Dambaan
- 5 Peta Intervensi:
Rekomendasi Spasial
Intervensi Kegiatan
- 6 Keterkaitan SL dan Resor
KPH (Rekomendasi Sinergi
dan Integrasi)
- 7 Rekomendasi Aktivitas
Pada Setiap Strategi
- 11 Model Usaha Perhutanan
Sosial Berbasis Jangka
Benah
- 13 Profitabilitas Sistem Usaha
Tani
- 16 Pembiayaan
- 18 Kesimpulan



Gambaran Umum

Terletak di Desa Mangsang dan Desa Sukadamai, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sublanskap-2 Mangsang Sukadamai merupakan bentang lahan yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat desa setempat. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sumber penghidupan yang menempatkan harapan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kedudukan Sublanskap-2 menjadi sangat strategis dan tidak tergantikan bagi keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

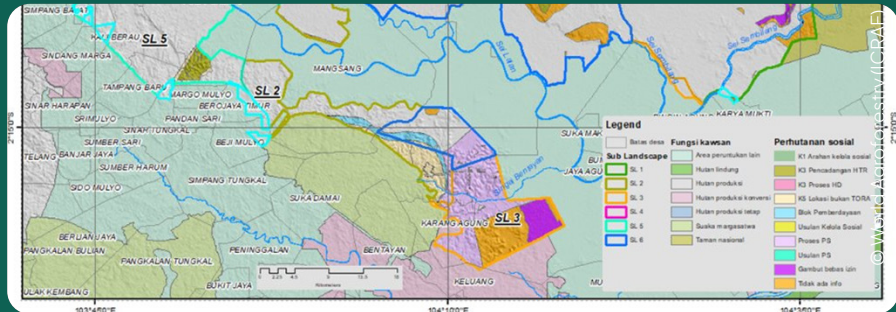
Sublanskap-2 Mangsang Sukadamai memiliki luas sekitar 17.049 hektare yang tersebar di Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tunkal Raya. Secara keseluruhan, wilayah ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mendis. Lebih lanjut, Sublanskap-2 berada dalam cakupan Resor Mangsang dan berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa Bentayan, sebuah kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam perlindungan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah.

Keberadaan Sublanskap-2 bukan sekadar hamparan lahan, melainkan ruang hidup yang kebermanfaatannya sangat

dirasakan oleh masyarakat. Berbagai aktivitas pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Sekadar hamparan lahan, melainkan ruang hidup yang kebermanfaatannya sangat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai aktivitas pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi alam dan sumber daya manusia yang tersedia.





Isu Strategis Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya

1. Masyarakat desa Bertani di dalam area Kawasan hutan yang dikelola KPH
2. Wilayah SL berada diantara Fungsi Ekosistem Gambut Lindung, HGU Perkebunan Kelapa Sawit, Suaka Margasatwa Bentayan dan Area Izin Pertambangan.
3. Khusus di Desa Mangsang, belum terdapat Izin PS yang telah terbit
4. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap informasi batas Kawasan Hutan dan akses pengelolaan terhadap lahan, sehingga pengelolaan oleh Masyarakat dikhawatirkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang
5. Keterbatasan tenaga pendamping, baik dari KPH ataupun Pemerintah Desa dalam upayanya untuk memaksimalkan sosialisasi kepada Masyarakat
6. Diperlukannya tata batas Kawasan hutan produksi dan inventarisasi potensi yang dapat dikembangkan menjadi area perhutanan sosial.
7. Pendekatan Jangak Benah untuk Optimalisasi Izin Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu solusi yang diperoleh Masyarakat desa hutan untuk dapat mendapatkan akses lahan secara legal di dalam Kawasan Hutan Produksi KPHK Lalan Mendis



Visi

Terwujudnya pengelolaan Sub-bentang lahan yang berkelanjutan dan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara efektif yang memberikan manfaat terhadap masyarakat

Strategi Pengelolaan dan Capaian Dambaan



Strategi-1

Pengembangan Multiusaha Kehutanan

Wilayah Sub Lanskap-2 Mangsang Sukadamai memiliki potensi dalam pengembangan Multiusaha Kehutanan berbasis Agroforestri pada area Izin Perhutanan Sosial yang telah terbit

Pemanfaatan berkelanjutan

Konservasi

Restorasi bentang lahan



Strategi-2

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Pengetahuan Masyarakat pada tata Kelola Kelembagaan perlu untuk dikuatkan sebagai upaya dalam memaksimalkan sumberdaya lahan yang dimiliki bagaimana kelompok dibentuk, bekerja, mengambil keputusan, dan membangun legitimasi

Pemanfaatan berkelanjutan



Strategi-3

Penguatan Kapasitas Hak Akses di Kawasan Hutan

Masyarakat Desa Hutan perlu untuk mendapatkan informasi dan pendampingan untuk mengetahui akses yang tersedia dalam pengelolaan lahan di Kawasan Hutan

Pemanfaatan berkelanjutan



Strategi-4

Mitigasi Risiko Kebakaran Lahan

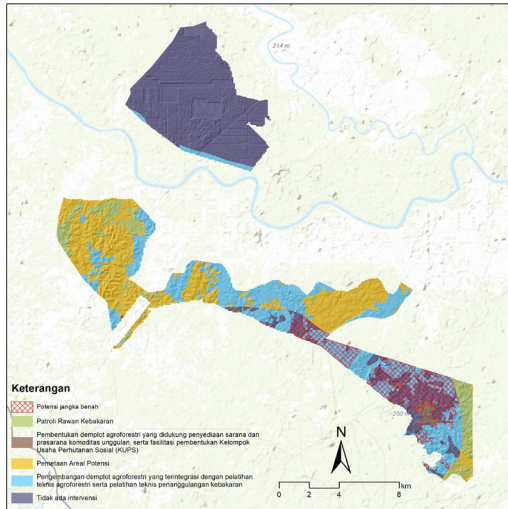
Dalam waktu tertentu, risiko kebakaran lahan dapat mempengaruhi aktivitas dan pendapatan Masyarakat. Oleh sebab itu upaya mitigasi diperlukan untuk menjaga kestabilan penghidupan Masyarakat Desa Hutan

Pemanfaatan berkelanjutan

Konservasi

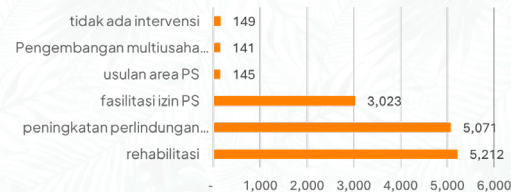
Restorasi bentang lahan

Peta Intervensi: Rekomendasi Spasial Intervensi Kegiatan

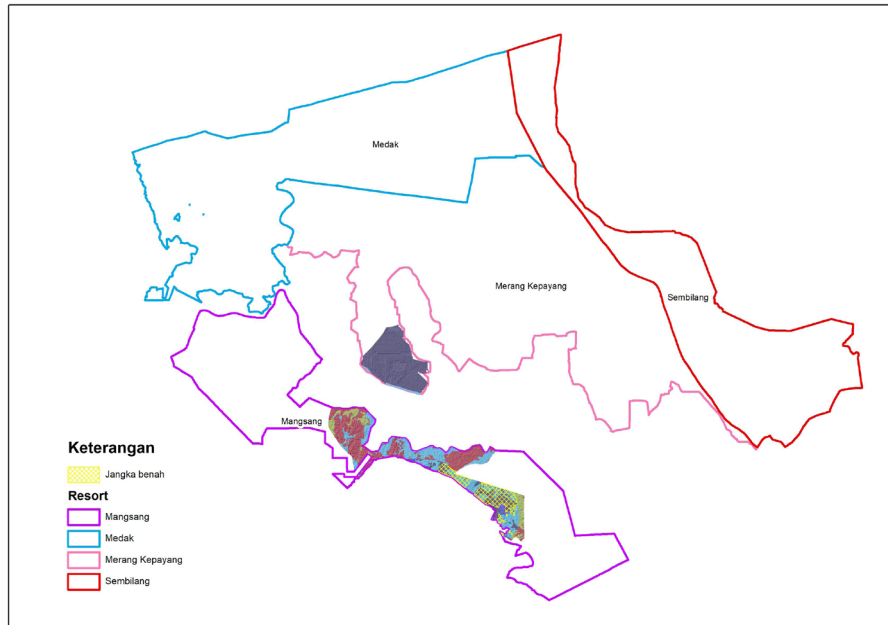


Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-leputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Keempat strategi Sublanskap Mangsang-Sukadamai telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Daerah dengan luasan areal terbesar adalah area untuk rehabilitasi. Strategi ini berada pada luas 5.212 ha atau 30.99% dari total luasan Sublanskap Mangsang-Sukadamai. Selain intervensi tersebut, peningkatan perlindungan gambut juga memiliki areal yang cukup dominan yaitu 5.071 ha atau mencapai 30.15 % dari total luas Sublanskap Mangsang-Sukadamai.



Keterkaitan SL dan Resor KPH (Rekomendasi Sinergi dan Integrasi)



Luas SL 2 terhadap resor KPH

Mangsang	11,479.65
Medak	0
Merang Kepayang	5,249.62
Sembilang	0
Tidak ada data	90.04

Proporsi luas terhadap SL 2 serta wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan intervensi jangka benah.

Rekomendasi Aktivitas Pada Setiap Strategi

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung	Tagging RPHJP
1	Pengembangan Multiusaha Kehutanan Berbasis Agroforestri	Meningkatnya perekonomian masyarakat sebesar 30% dalam jangka waktu 10 tahun melalui multiusaha kehutanan berbasis agroforestri				
1.1	Pengembangan Usaha Agroforestri (Pembiayaan Usaha dan Pemasaran)	Terbentuknya UMKM berbasis komoditas agroforestri	≥1 usaha agroforestri difasilitasi pengembangannya pada tahun ke-5	1. KPH 2. Dinas UMKM	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Pemerintah Desa 4. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
1.1.1	Pendampingan dan Penyuluhan (Pupuk Organik, peternakan, lebah, perikanan, dan akses lahan)	Masyarakat mendapatkan pendampingan dan penyuluhan usaha agroforestri	1 kelompok masyarakat menerima pendampingan minimal 1 kali/tahun	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	
1.1.1.1	Dibentuknya Demplot Agroforestri	Terbentuknya demplot agroforestri	≥1 demplot agroforestri dibangun (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi
1.1.1.2	Identifikasi Pasar bagi Komoditas Unggulan	Teridentifikasinya pembeli potensial	1 dokumen hasil identifikasi pasar (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Unggulan	Sarana prasarana produksi tersedia dan dimanfaatkan oleh kelompok	Sarana prasarana tersedia dan digunakan oleh ≥ 1 kelompok	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. BPTH 2. Pemegang izin konsesi	Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi
1.1.1.4	Pelatihan Teknis (pemilihan varietas, budidaya unggul, teknik agroforestri)	Masyarakat mengikuti dan memahami pelatihan teknis agroforestri	≥20 peserta mengikuti 1 kali pelatihan teknis	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Akademisi 2. BPTH 3. Pemegang izin konsesi 4. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
1.1.1.5	Penyuluhan terkait Pupuk Organik, Peternakan, Lebah, dan perikanan	Penyuluhan dilaksanakan dan diikuti masyarakat	≥1 kegiatan penyuluhan per jenis usaha pendukung	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Akademisi 2. BPTH 3. Pemegang izin konsesi 4. Mitra Pembangunan	

Strategi 2–Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Masyarakat

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung	Tagging RPHJP
2	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Masyarakat	Terbentuknya kelembagaan aktif sebanyak ≥ 3 selama 10 tahun sebagai penyokong perekonomian masyarakat desa hutan				
2.1	Fasilitasi akses pendanaan	Jumlah kelompok yang memperoleh akses pendanaan formal	≥ 2 kelompok usaha difasilitasi akses pendanaan pada tahun ke-5	KPH	1. Pemegang izin konsesi 2. Pemerintah Desa 3. Perbankan	Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi
2.1.1	Pembentukan & Legalitas Kelembagaan	Terbentuknya kelompok usaha masyarakat berbasis Perhutanan Sosial	≥ 1 kelompok usaha terbentuk (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	
2.1.1.1	Pendampingan Kelembagaan	Kelompok memiliki struktur organisasi aktif	≥ 1 kelompok memiliki struktur pengurus & administrasi dasar aktif (thn 1))	KPH	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang izin konsesi 3. Mitra Pembangunan	
2.1.1.2	Fasilitasi pembentukan kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS/KTH)	Terbentuknya kelompok usaha PS (KUPS/KTH)	≥ 1 KUPS/KTH terbentuk (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	
2.1.1.3	Penyusunan AD/ART, struktur, legalitas kelembagaan	Terbitnya AD/ART, struktur organisasi, dan Legalitas Kelembagaan.	1 paket dokumen kelembagaan (thn 2)	Pemerintah Desa	1. KPH 2. Pemegang izin konsesi	
2.1.2	Kelembagaan Beroperasi Secara Aktif	Kelompok usaha menjalankan tata kelola dasar secara konsisten	≥ 1 kelompok usaha melaksanakan rapat, administrasi, dan pencatatan keuangan sederhana (thn 2–3)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
2.1.2.1	Pelatihan Pengenalan komoditas unggulan dan peluang usaha	Meningkatnya presentase peserta menerapkan teknik yang telah diajarkan	Presentase peserta yang mengadopsi praktik sebesar 30% (thn 1)	KPH	1. BPTH 2. Pemerintah Desa 3. Pemegang izin konsesi 4. Mitra Pembangunan	
2.1.2.2	Pelatihan pengurus, administrasi, keuangan, pemasaran	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap pelatihan kelembagaan yang telah dilakukan	Sebanyak ≥ 2 lembaga aktif setelah adanya pelatihan (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Dinas UMKM 2. Pemegang izin konsesi	

Strategi 3–Penguatan Kapasitas Hak Akses di Kawasan Hutan

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung	Tagging RPHJP
3	Penguatan kapasitas hak akses di Kawasan Hutan	Dalam 10 tahun, masyarakat memiliki hak akses legal ditunjukkan dengan terbitnya SK Perhutanan Sosial dan tersusunnya RKPS sebanyak ≥ 2 Kelompok.				
3.1	Perolehan Hak Akses Perhutanan Sosial	Tersedianya usulan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh masyarakat	≥ 1 usulan PS diajukan pada tahun ke-3	1. KPH 2. Balai PS	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang izin konsesi	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
3.1.1	Peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap PS & Proses Izin	Masyarakat memahami konsep, hak, dan kewajiban Perhutanan Sosial	≥ 1 desa sasaran mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman (thn 1)	1. KPH 2. Balai PS	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang izin konsesi	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada KPH
3.1.1.1	Penyuluhan Perhutanan Sosial dan Hak Akses Kawasan Hutan	Meningkatkan pemahaman dasar masyarakat tentang skema, hak dan kewajiban PS	≥ 1 kegiatan penyuluhan diikuti masyarakat desa sasaran	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Balai PS 2. Pemegang izin konsesi	
3.1.2	Peningkatan Kapasitas Teknis & Kelembagaan Calon KUPS	Calon KUPS memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan dasar	≥ 1 calon KUPS terbina (thn 1–2)	1. KPH 2. Balai PS	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang izin konsesi	
3.1.2.1	Pelatihan Teknis HHBK, Agroforestri, dan SDH	Peserta pelatihan menerapkan minimal satu praktik teknis PS	≥ 1 kali praktik teknis diterapkan oleh calon KUPS	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
3.1.2.2	Pelatihan Administrasi, Kelembagaan, dan RKPS	Calon KUPS menyusun dokumen administrasi dan RKPS	≥ 1 dokumen RKPS sederhana disusun	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Balai PS 2. Pemegang izin konsesi	
3.1.3	Penyiapan Substansi & Dokumen Usulan PS	Tersusunnya substansi dan dokumen usulan PS	≥ 1 paket dokumen usulan PS siap diajukan (thn 2–3)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Balai PS 2. Pemegang izin konsesi	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
3.1.3.1	Pemetaan Areal potensi PS	Tersusunnya peta areal potensi PS	1 peta tematik (thn 1)	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Balai PS 2. Pemegang izin konsesi	Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada KPH
3.1.3.2	Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial	Terbentuknya kelompok PS dan menjalankan fungsi dasar organisasi	≥ 1 kelompok PS aktif dan diakui secara local	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. Pemegang izin konsesi 2. UPT Kementerian 3. Mitra Pembangunan	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial

Strategi 4 – Mitigasi Risiko Kebakaran Lahan

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Instansi Penanggungjawab	Instansi Pendukung	Tagging RPHJP
4.	Mitigasi Risiko Kebakaran Lahan	Dalam 10 tahun, masyarakat mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran lahan secara mandiri, dan penurunan kejadian titik api di wilayah intervensi minimal 30%.				
4.1	Penguatan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Berbasis Masyarakat	Masyarakat dan kelembagaan lokal menerapkan sistem pencegahan dan respon awal kebakaran lahan secara terkoordinasi	≥ 1 desa sasaran menerapkan sistem pencegahan dan respon awal kebakaran	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. KMPA 2. Pemegang Izin Konsesi	Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4.1.1	Pengaktifan dan Operasionalisasi Kelembagaan Pencegahan Kebakaran	Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan pencegahan kebakaran masyarakat (MPA/KMPA)	≥ 1 MPA/KMPA aktif di desa sekitar kawasan hutan pada tahun ke-1	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. BPBD 2. Pemegang Izin konsesi	
4.1.1.1	Pembentukan MPA/ KMPA dan Satgas Kebakaran Lahan	MPA/KMPA dan Satgas Kebakaran Lahan terbentuk dan menjalankan peran dasar pencegahan kebakaran	Minimal 1 MPA/KMPA dan Satgas Kebakaran Lahan terbentuk dan ditetapkan melalui SK Kepala Desa/KPH pada tahun ke-1	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. BPBD 2. Pemegang Izin konsesi	
4.1.1.2	Pelatihan Teknis Penanganan Kebakaran	Terselenggaranya pelatihan teknis penanganan kebakaran bagi masyarakat	≥ 1 kali pelatihan pada tahun ke-1	1. KPH 2. BPBD 3. MPA/KMPA	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang Izin konsesi 3. UPT Kementerian	
4.1.2	Pelaksanaan Pencegahan dan Respon Kebakaran di Tingkat Tapak	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan respon awal kebakaran di wilayah rawan	Minimal 2 kegiatan patroli pencegahan per tahun sejak tahun ke-1	1. Pemerintah Desa 2. KPH	1. BPBD 2. MPA/KMPA	
4.1.2.1	Sosialisasi dan edukasi pencegahan Kebakaran lahan	Masyarakat menerapkan praktik pencegahan kebakaran dalam aktivitas sehari-hari	≥ 1 praktik pencegahan kebakaran diterapkan di desa sasaran	1. Pemerintah Desa 2. KPH	1. BPBD 2. MPA/KMPA	
4.1.2.2	Patroli pada wilayah rawan kebakaran	Terlaksananya patroli pencegahan kebakaran di wilayah rawan	Minimal 2 kali patroli per musim kemarau	1. MPA/KMPA 2. KPH	1. Pemerintah Desa 2. Pemegang Izin 3. BPBD	
4.1.2.3	Kerjasama Lintas Lembaga dalam pencegahan kebakaran lahan	Terlaksananya kerjasama lintas lembaga dalam pencegahan kebakaran lahan di tingkat tapak	Minimal 1 dokumen kesepakatan kerjasama (MoU/Perjanjian Kerja Sama) antara KPH, Pemerintah Desa, dan pihak terkait	1. KPH 2. Pemerintah Desa	1. BPBD 2. TNI/Polri 3. Manggala Agni 4. Pemegang izin konsesi	



Model Usaha Perhutanan Sosial Berbasis Jangka Benah

Merupakan suatu usulan model usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana Kerjasama pada Tingkat SL dalam pengelolaan LPHD, dengan kerangka sebagai berikut :

- **Peran inti (LPHD → KUPS):** LPHD menetapkan mandat, aturan main, dan target usaha; KUPS menjadi operator yang mengelola produksi-agregasi-pemasaran multi-komoditas untuk anggota/kelompok.
- **Portofolio komoditas:** (1) Sawit (skema jangka benah), (2) Karet, (3) Hortikultura: sayur + buah (durian/alpukat/petai/pisang).
- **Alur pasar utama per komoditas:**
 1. Sawit → pengepul desa → pabrik sawit
 2. Karet → koperasi/ pengepul desa → suplier BOKAR → pabrik karet (opsi skema lelang untuk harga lebih fair)
 3. Hortikultura → pedagang/warung bahan pangan → rumah tangga, warung makan, dan perusahaan sekitar desa
- **Apa yang harus dikerjakan LPHD (sebagai pengelola):** menetapkan SOP dan standar mutu/traceability, skema bagi hasil & biaya layanan KUPS, serta kerangka kemitraan/kontrak (dengan pabrik, pedagang, warung, perusahaan).
- **Apa yang dijalankan KUPS (operasional harian):** konsolidasi volume, pengumpulan & grading, logistik dan distribusi, transparansi harga (terutama lelang karet), pencatatan transaksi, serta pelaporan kinerja rutin ke LPHD.

Faktor Pemungkin

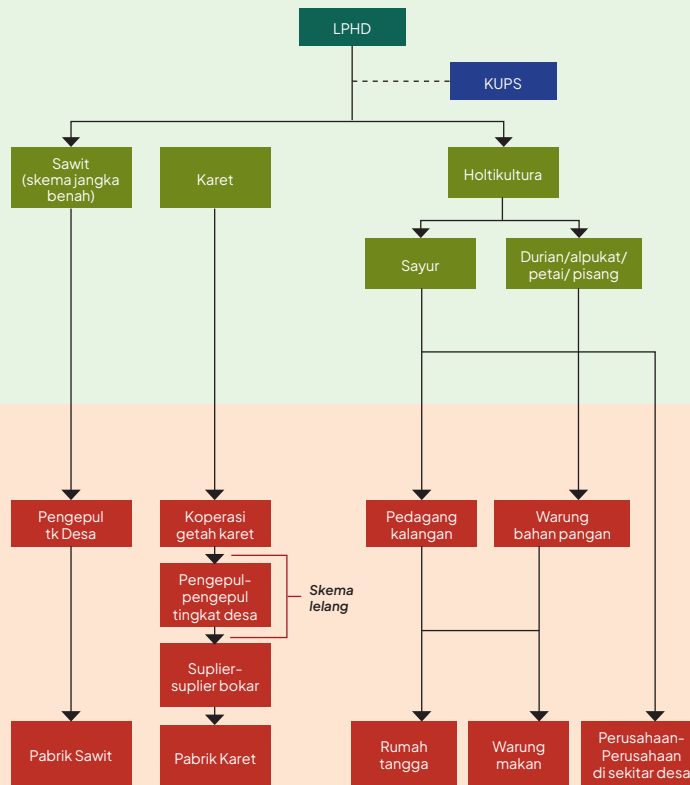
Proses Produksi

- Regulasi dan legalitas kawasan perhutanan sosial
- Ketentuan pemanfaatan di hutan produksi
- Aturan pengelolaan ekosistem gambut
- Regulasi tentang skema jangka benah
- Ketentuan rehabilitasi dan perlindungan/ pemulihan Kawasan hutan
- Kepatuhan pada rencana kerja (RKU/RKT)
- Pedoman teknis budidaya
- Aturan kemitraan dan kelembagaan
- Prinsip kesetaraan gender

Pemasaran

- PBPH multi usaha
- Aturan tata niaga hasil hutan
- Ketentuan pemasaran sawit dalam skema jangka benah
- Pengalihan bertahap ke komoditas kehutanan/ agroforestri
- Sertifikasi, Standar Keberlanjutan, traceability
- Standar mutu dan keamanan pangan
- Provisi Sumber Daya Hutan
- SNI penanganan pasca panen, pengolahan dan standar kualitas produk
- Prinsip kesetaraan gender
- Program kredit usaha mikro

Kegiatan Usaha Inti



Faktor Pendukung

- Input pertanian & perkebunan: benih/ bibit unggul, pupuk organik, pestisida dan herbisida organik, sarana produksi
- Tenaga penyuluh pertanian/perkebunan/ kehutanan
- Penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan & pendampingan produksi
- Pengetahuan dan sumber informasi
- Teknologi tepat guna & terjangkau
- Infrastruktur pendukung
- Dukungan tata kelola & pengawasan
- Sumber pembiayaan & permodalan

- Penguatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) pengelolaan bisnis, pemasaran
- Gudang
- Sertifikasi
- Pelabelan & pengemasan
- Teknologi informasi
- Saluran distribusi & infrastruktur pendukung
- Informasi harga & akses pasar
- Kemitraan dan jaringan pemasaran
- Sumber pembiayaan & permodalan

Institusi Pendukung

- LPKD dan KUPS
- Pemerintah desa
- KPH Lalan Mendis
- Dishut Provinsi Sumsel
- Polhut
- BKSDA Sumsel
- Bappeda Muba
- Dishut Kab. Muba
- Dinas TPHP Kab. Muba
- Balai Perbenihan/ UPT Perbenihan (Provinsi/Kabupaten)
- Balai Penyuluh Pertanian
- Dinas Koperasi, UKM Kab. Muba
- Disperindag Muba
- PUPR Muba
- DPMD Muba
- BPBD Muba
- Pemegang PBPH
- Pendamping PS / Mitra Pembangunan/ Akademisi
- Lembaga keuangan formal

- KPH Lalan Mendis
- Pemerintah desa
- BUMDesa/KMP
- Dinas TPHP Muba
- Dinas Koperasi & UKM
- Lembaga Sertifikasi (ISPO / GAP / Organik)
- Dinas Perindustrian dan perdagangan
- DPMPSTP
- GAPKI
- GAPKINDO
- KADIN
- NGOs, Lembaga riset, universitas
- Lembaga pembiayaan formal
- Sektor swasta/ perusahaan/Pabrik

Profitabilitas Sistem Usaha Tani

Analisis manfaat ekonomi dalam penggunaan lahan dan usaha tani menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode *Land Use Profitability Assessment* (LUPA) yang dikembangkan oleh ICRAF/World Agroforestry, kajian ini mengukur profitabilitas atau manfaat ekonomi usaha tani sebagai indikator utama nilai pengembalian dari kegiatan produksi dari strategi pengelolaan lahan berkelanjutan dan model bisnis yang diterapkan. Kajian ini mendorong transformasi kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditanami kelapa sawit sehingga dibutuhkan upaya jangka panjang dengan merubah sistem monokultur menjadi agroforestri kelapa sawit hingga agroforestri karet, yang merupakan jenis HHBK yang diperbolehkan untuk dibudidayakan di kawasan hutan.

Indikator yang digunakan:

- **Net Present Value:** keuntungan (profit) terdiskonto selama kegiatan usaha dijalankan yang dijadikan nilai saat ini, selisih antara penerimaan terhadap biaya. Diskonto: normalisasi nilai keuntungan masa depan ke masa kini.
- **Equal Annual Equivalent (EAE):** digunakan untuk membandingkan keuntungan SUT yang memiliki siklus hidup berbeda. EAE adalah ekuivalen rata-rata NPV per tahun yang terdiskonto.



- **Return to Labour:** menunjukkan imbalan terhadap tenaga kerja yang diperoleh dari usaha tani atau tingkat upah.
- **Internal Rate of Return (IRR):** tingkat efisiensi dari sebuah investasi dan menjadi alat ukur kemampuan usaha tani dalam mengembalikan bunga pinjaman.
- **Benefit Cost Ratio:** Efisiensi dari usaha yang dilakukan. Membandingkan manfaat atau pendapatan kotor yang dengan biaya total (telah terdiskonto).
- **Payback Period:** Estimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dibuat untuk sebuah proyek.

Indikator Ekonomi	Kelapa Sawit Monokultur (Praktik Tradisional)	Kelapa Sawit & Karet Agroforestri (Praktik Baik)
	14 Tahun	30 Tahun
<i>Net Present Value</i> (Rp/Ha)	208.547.068	209.349.924
<i>Equivalent Annual Earnings</i> (Rp/Ha/Thn)	22.925.294	15.782.939
<i>Return to Labour</i> (Rp/HOK)	539.335	423.625
<i>Gross Benefit Cost Ratio</i>	3,34	2,31
Biaya Investasi (Rp/Ha)	11.396.339	16.323.939
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (Hari Orang Kerja)	752	1.471

Simulasi ini dilakukan pada kondisi ketelanjuran kelapa sawit monokultur pada kawasan hutan (tanaman usia 10 tahun) yang perlu di perbaiki melalui mekanisme jangka benah, yaitu merubah sistem openanaman

menjadi agroforestri dan tidak melakukan penanaman sawit kembali setelah usia sawit 25 tahun.

Perubahan dari sistem penanaman sawit secara monokultur menjadi Karet

Agroforestri dengan penanaman sisipan karet dan petai pada usia sawit 11 tahun dan setelah sawit ditebang (tahun siklus ke 26) menghasilkan keuntungan yang sedikit lebih tinggi, disamping tetap memberikan manfaat lain. Setelah dilakukan penggantian



tanaman sawit di dengan karet, petai berkualitas unggul dan terong, dengan periode analisis yang lebih panjang, nilai yang NPV, EAE IRR, dan BCR tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan diversifikasi dengan karet dan petai sebagai HHBK mampu mempertahankan nilai ekonomi sistem.

Masyarakat juga memperoleh opsi hasil pemanenan lainnya yaitu karet, petai, dan terong yang berpotensi tinggi untuk digiatkan kembali pemasarannya. Penerapan budidaya yang baik pada karet, kopi, dan petai diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas panen sehingga memenuhi potensi pasar yang lebih besar dan luas. Pada simulasi ini, rata-rata secara berturut-turut adalah 407 kg

getah karet/tahun, dan 4.367 papan petai/tahun dan 160 kg terong/tahun. Saat ini getah karet masih banyak yang dijual dalam bentuk getah karet yang direndam dengan cuka getah, pemrosesan pasca panen yang baik dapat menggunakan cuka asap semut atau cair dapat meningkatkan kualitas berat kering walau membutuhkan waktu yang lama. Getah karet umumnya dapat dijual dengan harga Rp12.500/kg dalam kurun waktu seminggu setelah direndam dengan cuka. Petai dijual dengan harga Rp1.500/ papan dan terong dijual dengan harga Rp13.000/kg.

Transisi ini memerlukan biaya 49% lebih tinggi dan tenaga kerja yang lebih tinggi melibatkan kegiatan yang

lebih kompleks dan multi jenis dari beberapa jenis tanaman, namun tetapi berkontribusi pada keberlanjutan, diversifikasi pendapatan petani, potensi manfaat ekologi yang lebih tinggi dan pengembalian atas tenaga kerja mampu bersaing dengan upah yang berlaku di kawasan, dilihat dari nilai R_{tL} yang lebih besar dibandingkan upah rata-rata (Rp120.000/HOK). Kebutuhan tenaga kerja yang lebih besar berdampak positif untuk penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan rumah tangga dalam pemanfaatan hutan.

Pengelolaan kawasan perhutanan sosial dengan strategi jangka benah dapat menjadi alternatif yang layak secara insial sekaligus lebih inklusif secara sosial.

Pembiayaan

Penerapan Model Bisnis Optimalisasi Perhutanan Sosial Melalui Jangka Benah membutuhkan strategi pengelolaan biaya yang tepat agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan

menguntungkan. Beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Biaya operasional dalam perhutanan sosial berupa bibit unggul (untuk penanaman baru), alat

dan sarana produksi. Biaya variabel meliputi tenaga kerja, pupuk untuk pemeliharaan tanaman.

2. Biaya investasi antara pengelolaan monokultur dan agroforestri tidak

Sistem Usaha Tani	Investasi Pertama/Biaya Pembangunan (Rp/Ha/Tahun)			Total Biaya (Rp/Ha)		
	Biaya Tetap	Biaya Variabel	Total	Biaya Tetap	Biaya variabel	Total
Kelapa Sawit Monokultur	6.290.000	5.106.339	11.396.339	53.780.000	83.978.695	137.758.695
Kelapa Sawit & Karet Agroforestri	10.369.600	5.954.339	16.323.939	135.050.526	245.452.800	380.503.326



jauh berbeda. Biaya seringkali menjadi kendala terutama untuk pengusaha baru, untuk mengurangi beban ini, KUPS dapat mengajukan pendanaan untuk mendapatkan subsidi atau program dari instansi lain.

3. Produktivitas karet dan petai secara jangka panjang bergantung pada pemupukan berimbang menggunakan pupuk kandang, kompos, dan pupuk kimia. Agar

kebutuhan pupuk terpenuhi, dibutuhkan pupuk subsidi yang kontinu, pelatihan pembuatan kompos, serta pemanfaatan pupuk kandang dari ternak masyarakat. Jumlah pupuk yang diperlukan akan menyesuaikan dengan jumlah bibit dan target produktivitas.

4. Pemanenan dan pengolahan pasca panen merupakan salah satu komponen biaya yang besar. Biaya ini dipengaruhi

oleh volume hasil panen dan durasi pemrosesan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, diperlukan pelatihan pemanenan pengolahan pasca panen karet.

Dengan strategi yang tepat dalam pengelolaan biaya, dukungan pelatihan, dan efisiensi proses, model bisnis optimasi Perhutanan Sosial ini dapat menjadi sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi petani di kawasan hutan.

Kesimpulan

1. **Rencana Pengelolaan Sublanskap-2 Mangsang Sukadamai** disusun sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang memberi manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.
2. Rencana ini mengarahkan pengelolaan ruang berbasis visi bersama yaitu **“Terwujudnya pengelolaan Sub-bentang lahan yang berkelanjutan dan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara efektif yang memberikan manfaat terhadap Masyarakat”** melalui pendekatan solusi berbasis alam untuk meningkatkan ketahanan sub-bentang lahan-2 Mangsang Sukadamai.
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap merupakan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan di lanskap Kahu. Rencana ini merupakan hasil dari proses diskusi yang dihadiri dan

disepakati bersama oleh perwakilan dari KPH Lalan Mendis, Pemerintah Desa Mangsang dan Sukadamai, Kelompok Tani, Universitas Muhammadiyah Palembang, dan NGO.

4. Dihasilkan **empat strategi utama**: pengembangan multiusaha kehutanan agroforestri, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan hak akses kawasan hutan, dan mitigasi kebakaran lahan.
5. Sublanskap memiliki **potensi pengembangan HHBK, agroforestri, dan pangan lokal** yang didukung sumber daya manusia serta optimalisasi lahan melalui model bisnis perhutanan sosial berbasis jangka benah sehingga dapat menjadi solusi dalam menjaga sumber pendapatan masyarakat yang berketahanan iklim.
6. Keberhasilan implementasi bergantung pada **sinergi pemangku kepentingan, integrasi ke dokumen perencanaan resmi, serta dukungan pendanaan berkelanjutan**.



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

